

# Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Rakyat (Spr) Sapi Potong di Kabupaten Konawe

(Supporting and Inhibiting Factors of Beef Cattle Sentra Peternakan Rakyat Developmentin Konawe Regency)

Putra Wiadnyana<sup>1</sup>, Takdir Saili<sup>1</sup>, La Ode Arsad Sani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

arsadni@yahoo.com

**Abstrak.** Faktor pendukung dan penghambat pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dapat diketahui berdasarkan ketersediaan fasilitas fisik dan fasilitas non fisik. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam rangka pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe dan menentukan kecamatan yang layak untuk mengembangkan kawasan SPR sapi potong. Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten Konawe yaitu Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala, ketersediaan sarana fasilitas fisik dan non fisik yang mendukung dan menghambat yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan faktor pendukung dan penghambat SPR dari segi ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik di Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung fasilitas fisik yang tersedia RPH, puskesmas, pos IB, kebun HMT, pabrik/gudang pakan, serta padang penggembalaan dan fasilitas non fisik yaitu adanya lembaga kemitraan, lembaga keuangan, koperasi dan kebijakan. Faktor penghambat terbatasnya ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik seperti puskesmas, pabrik/gudang pakan dan RPH yang hanya ada di Kecamatan Wawotobi serta tidak tersedianya lembaga kemitraan, lembaga keuangan dan koperasi di beberapa kecamatan. Berdasarkan persentase pada setiap kecamatan maka ditentukan ketersediaan fasilitas fisik 78% dan non fisik 50%. Wilayah yang menjadi prioritas untuk pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe berturut-turut adalah (1) Kecamatan Wawotobi, (2) Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Puriala, (3) Kecamatan Lambuya.

**Kata kunci:** SPR, peternakan, fasilitas fisik, fasilitas non fisik, pendukung dan penghambat.

**Abstract.** Supporting and inhibiting factors of Sentra Peternakan Rakyat development could be known based on availability of physical and non-physical facilities. The purpose of this study was to identify supporting and inhibiting factors of beef cattle SPR area development and to determine the proper district for beef cattle area development. Research was conducted in konawe district covered subdistrict of , amonggedo, wawotobi, lambuya and sub district of puriala. Unavailability of physical and non-physical facilities that supporting SPR development was analysed. Result of this research showed that supporting physical facilities that been existed in konawe district were slaughter house, animal health center, AI service center, forage fodder, factory/feed storage, pasture, and non-physical facilities that is partnership institution, financial institutions, cooperatives, and policy. Inhibiting factors were the limited of physical and non-physical facilities such as animal health center, factory/feed storage, and slaughterhouse that provided only in District Wawotobi, and unavailability of partnership institution, financial institution, and cooperatives in several districts. Based on the percentage of each district, it was determined that availability of physical facilities was 78%, and availability of non-physical facilities was 50%. The priority areas for beef cattle SPR area development in Konawe Regency were (1) District Wawotobi, (2) District Amonggedo and District Puriala, and (3) District Lambuya respectively.

**Keywords:** SPR, livestock, physical facilities, non-physical facilities, supporting, and inhibiting.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dalam pembangunan sektor pertanian berperan dalam penyediaan protein hewani, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah. Untuk itu pengembangan sub sektor peternakan sebagai bagian integral dari sektor pertanian perlu mendapat perhatian khusus dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan yang ada. Hal ini karena kegiatan pada sub sektor peternakan memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan petani, pemerataan perekonomian dan kesempatan kerja, serta perbaikan terhadap gizi masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai melalui peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak [1].

Meskipun potensi usaha peternakan sangatlah menarik, namun sejumlah tantangan bisa menjadi penghambat usaha yang bisa mengubah potensi keuntungan menjadi kerugian bagi peternak. Upaya mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, pemerintah telah mencanangkan program sentra peternakan rakyat (SPR). Sentra peternakan rakyat merupakan media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di suatu kawasan tertentu serta terdapat populasi ternak yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di suatu desa dan terdapat sumber daya baik alam maupun buatan untuk kebutuhan hidup ternak. Sekolah peternakan rakyat juga merupakan sarana berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kerjasama yang profesional dalam satu manajemen [2].

Agar mencapai hasil yang optimal, maka strategi pengembangan kawasan peternakan memerlukan perencanaan yang matang dan tepat, sehingga ruang yang digunakan untuk kegiatan pengembangan peternakan tidak bersaing dengan kegiatan lain dan tidak saling mengganggu antara peternakan itu sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu suatu penataan ruang kawasan peternakan secara khusus, yang disusun berdasarkan potensi daya dukung lahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan ternak, akses ke tempat pemasaran serta sarana dan prasarana yang menunjang usaha dibidang peternakan tersebut. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang berpotensi dalam pengembangan usaha peternakan. Salah satu kabupaten yang potensial untuk pengembangan sapi adalah Kabupaten Konawe dengan data populasi sapi pada tahun 2012 yaitu 33.156 ekor [3].

Data populasi sapi tahun 2013 sebanyak 29.469 ekor dengan penurunan 11.12% selanjutnya data populasi sapi pada tahun 2014 sebanyak 33.784 ekor peningkatan dari data sebelumnya menjadi 14.64% dan data populasi sapi pada tahun 2015 yaitu 42.269 ekor dengan peningkatan 25.12%. Populasi sapi Kabupaten Konawe berdasarkan data populasi sapi 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan tiap tahun sebesar 9,55%.[4].

Pelaksanaan program SPR sapi potong tentunya diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan yang telah ditentukan dalam rencana strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Upaya tersebut disamping untuk menekan impor daging dari luar daerah, juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai peternak. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe.

## 2. Metode Penelitian

Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih empat lokasi kecamatan yang dianggap memiliki potensi pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe. Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan hasil survey penelitian pendahuluan pada bulan Mei 2016, dan atas rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Konawe calon SPR yaitu Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala. Responden terdiri atas pengurus calon SPR sapi potong, petugas dari Dinas terkait dan anggota kelompok calon SPR sapi potong. Responden dari pengurus 15 orang, kariawan 6 orang dan anggota 60 orang sehingga secara keseluruhan jumlah responden adalah 81 orang.

Variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: dukungan fasilitas fisik SPR meliputi: Padang Penggembalaan/Rumput, Kebun Hijauan Pakan Ternak (HPT), Pabrik/Gudang Pakan,

Puskesmas, Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Fasilitas Pos IB dan Petugas Inseminator, dan Rumah Potong Hewan (RPH); dan Dukungan fasilitas non fisik SPR meliputi: Lembaga Kemitraan, Lembaga Keuangan, dan Koperasi.

Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya akan ditabulasi dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan potensi SPR dari segi ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik di Kabupaten Konawe.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 2.1 Faktor Pendukung Kawasan SPR Sapi Potong

*Ketersediaan Fasilitas Fisik.* Ketersediaan fasilitas fisik seperti RPH, puskesmas, pos IB, kebun HMT, pabrik/gudang pakan dan padang penggembalaan berdasarkan hasil penelitian di kawasan calon SPR sapi potong di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Fasilitas Fisik Kawasan Calon SPR Sapi Potong di Kabupaten Konawe

No	Kec.	Fasilitas Fisik						Persentase (%)
		RPH	Puskesmas	Pos IB	Kebun HMT	Pabrik/Gudang Pakan	Padang Penggembalaan	
1	Amonggedo	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	83%
2	Wawotobi	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	67%
3	Lambuya	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	67%
4	Puriala	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	83%

Ketersediaan fasilitas fisik di lokasi penelitian berdasarkan hasil survei yang paling berpotensi yaitu di Kecamatan Amonggedo dan Puriala masing-masing dengan presentase 83%, dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Wawotobi dan Lambuya.

*Fasilitas RPH.* Rumah pemotongan hewan adalah bangunan yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis untuk memotong hewan sehingga dapat menjadi titik kritis pertama penentuan keamanan produk daging yang dijual. Pada kawasan calon pengembangan SPR di Kabupaten Konawe dari hasil survei hanya terdapat 1 unit RPH yaitu di Kecamatan Wawotobi dan menjadi pusat pemotongan ternak di Kabupaten Konawe dan jarak antara RPH dengan ketiga kecamatan lainnya yang merupakan wilayah pengembangan SPR yaitu Kecamatan Amonggedo dengan jarak  $\pm 30$  km<sup>2</sup>, Kecamatan Lambuya  $\pm 25$  km<sup>2</sup> dan Kecamatan Puriala  $\pm 30$  km<sup>2</sup>. RPH ini berfungsi dan melayani pemotongan ternak serta menyediakan akan daging sehat dan higienis bagi masyarakat serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan daging aman, sehat, utuh, halal dan bermutu untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe dan sekitarnya.

*Fasilitas Puskesmas.* Peran penting puskesmas dan RPH adalah satu kesatuan yang ada di wilayah kawasan calon SPR sehingga akan tercipta pengamanan produk ternak yang diharapkan dan menghindarkan manusia dari mengkonsumsi bahan makanan yang terkontaminasi dengan bahan berbahaya seperti residu dan kuman penyakit zoonosis. Pada kawasan calon pengembangan SPR di Kabupaten Konawe, puskesmas hanya tersedia di Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Puriala, sedangkan Kecamatan Wawotobi dan Lambuya fasilitas puskesmas tidak tersedia.

Pusat kesehatan hewan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan. Pelayanan puskesmas dapat dilakukan diluar puskesmas oleh petugas kesehatan dengan mengunjungi tempat peternak yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan. Adanya puskesmas dapat membantu petugas kesehatan hewan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan [5].

Petugas teknis kesehatan hewan atau dokter hewan merupakan pelayan yang memberikan pelayanan teknis tentang kesehatan hewan di Kabupaten Konawe. Terdapat enam orang petugas teknis

kesehatan hewan pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe dengan 1 orang dokter hewan yang memberikan pelayanan kepada peternak di Kabupaten Konawe.

*Fasilitas Pos IB (Inseminasi Buatan).* Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut *insemination gun* dan dilakukan oleh petugas teknis inseminasi atau yang biasa disebut inseminator. Pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe fasilitas Pos IB terdapat pada setiap lokasi calon pengembangan SPR berikut tersedia dengan petugasnya dan fasilitas yang cukup memadai, yaitu fasilitas Pos IB di Kecamatan Amonggedo, Wawotobi dan Lambuya serta Kecamatan Puriala masing-masing tersedia satu unit.

Jumlah petugas pos IB pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe yaitu di Kecamatan Amonggedo 1 orang, Kecamatan Wawotobi 1 orang, Kecamatan Lambuya dan Puriala 5 orang. Petugas teknis atau inseminator adalah orang ataupun petugas yang secara langsung melakukan inseminasi ternak betina yang telah dilaporkan dalam keadaan birahi. Pada pelaksanaan dan keberhasilan IB, inseminator memegang peranan penting, umur, pengalaman sebagai inseminator dan tingkat pendidikan merupakan unsur yang cukup erat hubungannya dengan tingkat ketrampilan dan kemampuan dalam melakukan IB [6].

*Kebun HMT.* Ketersediaan kebun HMT di lokasi penelitian yaitu 11 Ha. Kebun HMT merupakan fasilitas fisik yang menunjang program SPR. Hasil survei di lapangan bahwa luas kebun HMT di Kabupaten Konawe tertinggi di Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Wawotobi yaitu masing-masing dengan luas 4 Ha, Kecamatan Lambuya 2 Ha dan Kecamatan Puriala 1 Ha. Luas kebun HMT pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe masih sangat perlu perluasan lahan atau penambahan kebun HMT untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan sebagai pakan cadangan agar ternak tidak kekurangan pakan pada musim kemarau.

[7] Ternak ruminansia akan berpenampilan dengan produktifitas rendah terutama disebabkan kualitas HMT yang kurang memadai pada musim kemarau.

*Pabrik/Gudang Pakan.* Pabrik/gudang pakan merupakan tempat untuk menyimpan bahan pakan maupun tempat pencampuran bahan pakan untuk kebutuhan hidup ternak. Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan fasilitas gudang pakan pada kawasan calon pengembangan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe, terdapat di Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala masing-masing memiliki 1 unit pabrik/gudang pakan, sedangkan di Kecamatan Wawotobi tidak terdapat pabrik/gudang pakan. Gudang pakan pada kawasan peternakan berguna sebagai tempat penyimpanan pakan baik konsentrat, silase atau dalam bentuk hijauan yang dikeringkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak ketika musim kemarau.

Lambung pakan pada kelompok ternak ruminansia pada prinsipnya adalah pembangunan gudang penyimpanan dan aplikasi teknologi pengolahan atau pengawetan hijauan pakan dan atau bahan pakan yang ada disekitar lokasi kelompok melalui pelatihan pakan untuk anggota kelompok [8].

## 2.2 Padang Penggembalaan Ternak

Padang penggembalaan merupakan suatu kawasan lahan yang dapat tumbuh padang rumput atau hijauan pakan ternak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kawasan calon pengembangan SPR di Kabupaten Konawe memiliki fasilitas fisik padang penggembalaan, yakni Kecamatan Amonggedo dengan luas ladang penggembalaan 1 Ha dan integrasi kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit banyak terdapat hijauan yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, serta integrasi dengan lahan pertanian. Kecamatan Wawotobi dengan luas ladang penggembalaan 2,5 Ha, Kecamatan Lambuya 3 Ha dan Kecamatan Puriala integrasi dengan lahan pertanian. Total luas padang penggembalaan pada kawasan SPR di Kabupaten Konawe adalah 6,5 Ha, dan sebagai lahan penggembalaan integrasi dengan lahan pertanian dan kebun kelapa sawit.

Berdasarkan ketersediaan padang penggembalaan yang ada pada kawasan calon pengembangan SPR di Kabupaten Konawe, masih perlu penambahan lahan padang penggembalaan karena pada usaha peternakan rakyat khususnya peternakan sapi potong yang dipelihara dengan cara semi intensif ketersediaan padang penggembalaan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak sehingga produktifitas ternak dapat meningkat.

[7] Rendahnya produktifitas ternak ruminansia selain disebabkan oleh pakan, juga disebabkan cara pemeliharaan yang tradisional dengan jumlah ternak yang minim. Sumber pakan yang berasal dari padang penggembalaan alam, merupakan pakan utama karena murah dan mudah penggunaannya.

*Ketersediaan Fasilitas Non Fisik.* Ketersediaan fasilitas non fisik yaitu lembaga kemitraan, lembaga keuangan, koperasi dan kebijakan/aturan. Persentase ketersediaan fasilitas non fisik kawasan calon SPR sapi potong berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Fasilitas Non Fisik Calon SPR Sapi Potong di Lokasi Penelitian

Fasilitas Fisik						
No	Kec.	Lembaga Kemitraan	Lembaga Keuangan	Koperasi	Kebijakan/Aturan	Persentase (%)
1	Amonggedo	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	50%
2	Wawotobi	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	75%
3	Lambuya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	25%
4	Puriala	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	50%

Ketersediaan fasilitas non fisik di lokasi penelitian berdasarkan hasil survei yang paling berpotensi yaitu Kecamatan Wawotobi dengan persentase 75% persentase ini tertinggi dari tiga kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Amonggedo, Lambuya dan Kecamatan Puriala.

#### a. Lembaga Kemitraan

Lembaga kemitraan merupakan salah satu fasilitas yang penting dalam keberadaannya disuatu kawasan peternakan, karena kemitraan membantu peternak dalam kerja sama usaha peternak yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian adanya lembaga kemitraan pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe hanya terdapat di Kecamatan Wawotobi yang bekerja sama antara kelompok peternak dengan lembaga kemitraan KKP BRI yaitu bentuk pelayanan yang memberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha peternakan. Ada pula lembaga kemitraan penjualan ternak yaitu lembaga yang membantu peternak dalam memasarkan ternak. Sementara pada tiga kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Puriala tidak terdapat lembaga kemitraan.

#### b. Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan di lokasi penelitian merupakan salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian masyarakat. Adanya lembaga keuangan bertujuan untuk membantu perkembangan pasar serta membantu permodalan usaha masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan berdasarkan hasil penelitian pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe, terdapat di tiga kecamatan yakni Kecamatan Amonggedo, Kecamatan Wawotobi, dan Kecamatan Puriala, sementara di Kecamatan Lambuya tidak terdapat lembaga keuangan. Usaha sektor peternakan diperlukan adanya lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi usaha peternak di pedesaan seperti bank umum, BPR, dan lainnya.

#### c. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan [9]. Berdasarkan hasil penelitian pada kawasan calon SPR di Kabupaten Konawe semua kecamatan di lokasi penelitian tidak terdapat koperasi. Koperasi merupakan lembaga yang dapat membantu ekonomi masyarakat khususnya yang masuk dalam

keanggotaan koperasi dan untuk membangun, mengembangkan potensi usaha serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945[9].

*d. Kebijakan/Aturan*

Kebijakan/aturan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dengan tujuan tertentu dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga menjadi sangat penting untuk pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Konawe. Berdasarkan hasil survei bahwa semua kecamatan yang menjadi kawasan SPR telah didukung kebijakan/aturan dari pemerintah daerah dengan menetapkan lokasi kawasan / sentra peternakan rakyat (SPR) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe No. 281 Tahun 2015.

*2.3 Faktor Penghambat Kawasan SPR Sapi Potong*

Faktor yang menghambat pengembangan calon kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe antara lain tidak tersedianya beberapa fasilitas fisik dan non fisik yang menjadi syarat pengembangan kawasan SPR sapi potong. Faktor penghambat lainnya seperti kerusakan habitat, penyakit, pencuri dan perkebangbiakan yang relatif lambat.

Berdasarkan data hasil survei di lapangan bahwa faktor penghambat atau kelemahan yang perlu diatasi yaitu tidak adanya sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti RPH di Kecamatan Amonggedo, Lambuya dan Kecamatan Puriala. Ketiga kecamatan tersebut memanfaatkan keberadaan RPH di Kecamatan Wawotobi yang membutuhkan waktu jarak tempuh yang relatif jauh, tidak adanya puskesmas di Kecamatan Wawotobi dan Kecamatan Lambuya, serta tidak adanya pabrik atau gudang pakan di Kecamatan Wawotobi. Fasilitas non fisik seperti lembaga kemitraan hanya tersedia di Kecamatan Wawotobi, lembaga keuangan tidak tersedia di Kecamatan Lambuya dan tidak adanya koperasi di empat kecamatan yang menjadi lokasi tempat penelitian. Ini dapat menjadi perhatian buat pemerintah daerah untuk mengadakan fasilitas-fasilitas yang tidak tersedia untuk mendukung pengembangan SPR, baik fasilitas fisik dan maupun non fisik di Kabupaten Konawe.

Selain dari faktor penghambat fasilitas fisik dan non fisik terdapat beberapa kendala yang perlu disikapi dalam pengembangan usaha sapi potong yaitu pemanfaatan sumber daya yang ada ditingkat peternak dan usaha yang dijalankan bersifat sambilan. Faktor luar yang juga mempengaruhi pengembangan usaha ternak sapi potong dari data survei di lokasi penelitian yaitu kerusakan habitat di karenakan pengembalaan yang di lakukan peternak hanya di satu tempat, sehingga perlu penanaman rumput hijau makanan ternak untuk menunjang keberlangsungan peternakan. Penyakit yang sering menyerang ternak sapi yaitu diare, mata merah, bercak kulit dan lumpuh. Penanganan dari peternak yaitu melaporkan kejadian kepada petugas kesehatan ternak setempat untuk mendapatkan pengobatan. Lambatnya peningkatan populasi ternak sapi diakibatkan karena kurangnya perhatian peternak untuk tidak memotong atau menjual sapi betina produktif serta kurangnya hijauan makanan ternak. Pencurian ternak sering terjadi, utamanya di Kecamatan Wawotobi.

**4. Kesimpulan**

1. Faktor pendukung fasilitas fisik pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe, yaitu tersedianya RPH, puskesmas, pos IB, kebun HMT, pabrik/gudang pakan, serta padang penggembalaan. Fasilitas non fisik yaitu adanya lembaga kemitraan, lembaga keuangan, koperasi dan kebijakan. Faktor penghambat antara lain terbatasnya ketersediaan fasilitas fisik dan non fisik seperti puskesmas, pabrik/gudang pakan dan RPH yang hanya ada di Kecamatan Wawotobi serta tidak tersedianya lembaga kemitraan, lembaga keuangan dan koperasi di beberapa kecamatan.
2. Berdasarkan ketersediaan faktor pendukung dan penghambat maka wilayah yang menjadi prioritas untuk pengembangan kawasan SPR sapi potong di Kabupaten Konawe berturut-turut adalah (1) Kecamatan Wawotobi, (2) Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Puriala, (3) Kecamatan Lambuya.

## 5. Daftar Pustaka

- [1] Arsyad, A. H. 2012. Analisis Potensi Daya Dukung Pengembangan Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pohuwato. Laporan Penelitian Dana PNB. Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo.
- [2] Ditjennak Keswan. 2015. Pedoman Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- [3] BPS Sultra. 2013. Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Kendari.
- [4] BPS Konawe. 2016. Kabupaten Konawe Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. <https://konawekab.bps.go.id/> (9 Agustus 2016).
- [5] Permentan RI No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan. Menteri Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- [6] Astuti, D., S. Nurtini dan R. Widiati. 2008. Kajian Sosial Ekonomi Pelaksanaan Inseminasi Buatan Sapi Potong di Kabupaten Kebumen. Mediagro. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- [7] Azmi dan Gunawan. 2004. Potensi Hijauan Pakan Lahan Perkebunan Untuk Pengembangan Sapi Potong di Bengkulu. Lokakarya Nasional Tanaman Pakan Ternak. Bengkulu.
- [8] Ditjennak Keswan. 2011. Pedoman Umum Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.